

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi



**UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus : Jl. DukuhMenanggal, XII/4, Telp- Fax. 031-8381183 Surabaya 60234  
Website : <http://www.uniprisby.ac.id>

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Aqila Ramadhana
Prodi / NIM	: Akuntansi / 191600280
Judul Skripsi	: Analisis Bimbingan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding Pada PT. Canggih Berkah Logistik yang berada di Surabaya
Dosen Pembimbing	: Drs. Teguh Purwanto, M.M.
Periode Kepembimbingan	: 17 September 2022, s/d 17 Maret 2023

#### URAIAN KEGIATAN KEPEMBIMBINGAN :

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KET.	TANDA TANGAN
1.	21/9/2022	Pengajuan judul skripsi		
2.	5/10/2022	Pengajuan Bab 1		
3.	19/10/2022	Pengajuan Bab 2		
4.	23/11/2022	Bimbingan Bab 3	ACC	
5.	1/3/2023, Rabu	Bimbingan bab 4 dan 5	Disetujui	
6.	6/3/2023, Senin	Bimbingan bab 4, 5 dan akhir	ACC	
7.				
8.				
9.				
10.				

Bimbingan selesai pada tanggal :

Dosen Pembimbing :

*[Signature]*

Drs. Teguh Purwanto, M.M.



Mahasiswa,

*[Signature]*

Aqila Ramadhana

## Lampiran 2 Berita Acara Bimbingan Revisi Skripsi

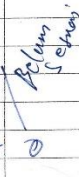


### UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS

Kampus : Jl. DukuhMenanggal XII/4, Telp- Fax. 031-8281183 Surabaya 60234  
Website : <http://www.unipasby.ac.id>

#### BERITA ACARA BIMBINGAN REVISI SKRIPSI

Nama : Aqila Raudhunn.  
 NIM/Program Studi : 101600290 / Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisa Pahlawan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23  
atas jasa freight forwarding Pada PT. Gunung Berkah Logistik  
Surabaya  
 Tanggal Ujian Skripsi : 31 Maret 2023  
 Penguji : 1. Dr. Aji Prasetyo, S.Et., MSA  
 2. Ds. Subakti, M.M

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Penguji
1	31/3/2023	- Proses dan pembayaran	 Aji Prasetyo
2	31/3/2023	- Gaji agar benar mekanisme.	
3		- pembayar (bank - listrik).	
4	31/3/2023	- Tuntutan di perbaiki	
5			
6			
7			
8			

Penguji I,

Dr. Aji Prasetyo, S.Et., MSA

Surabaya,  
Penguji II,

Ds. Subakti, M.M



UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS

Kampus : Jl. DukuhMenanggal XII/4, Telp- Fax. 031-8281183 Surabaya 60234  
Website : <http://www.unipasby.ac.id>

BERITA ACARA  
BIMBINGAN REVISI SKRIPSI

Nama : Aqila Romadhona  
NIM/Program Studi : 191602280 / Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas  
Jasa Freight Forwarding Pada PT. Garsal Berkah Logistik Surabaya  
Tanggal Ujian Skripsi : 31 Maret 2023  
Penguji : 1. Dr. Aji Prasetyo, S.Ef., MSA  
2. Subalit Drs. Subalit, M.M

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Penguji
1	31/3/2023	kurang masalah di bagian	
2	31/3/2023	metode analisa data	
3	6/4/23		
4			
5			
6			
7			
8			

Penguji I,

Dr. Aji Prasetyo, S.Ef., MSA

Surabaya,  
Penguji II,

Drs. Subalit, M.M

## Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data



### UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus : Jl. Dukuh Menanggal XII/4 , Telp- Fax. 031-8281183 Surabaya 60234

Website : <http://www.fe.unipasby.ac.id>

Nomor : 230551 /01/FEB/ 4/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth:  
Bapak/Ibu Pimpinan  
PT. Gangsal Berkah Logistik  
Jl. Golf II Nomor 2-6, Gunung Sari, Dukuh Pakis,  
Kota Surabaya

Sesuai Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, maka mahasiswa wajib menulis Skripsi/Tugas Akhir dalam bentuk Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah. Berkaitan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : Aqila Ramadhana  
NIM : 191600280  
Prodi : Akuntansi  
Judul : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Gangsal Berkah Logistik Surabaya

Demikian atas perkenan serta kebijaksanaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 1 Maret 2023  
Dekan,



**Tony Susilo Wibowo, SE., M.Pd., MSM**  
NPP : 0709494/DY

## Lampiran 4 Balasan Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data



### PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK

Jl. Golf II No. 2-6 Surabaya, 60224  
Email. gangsalberkahlogistik@gmail.com

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/GBL-SK/III/2023

Surabaya, 3 Maret 2023

Lampiran :

Perihal : Balasan Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth :

Ketua Prodi Akuntansi

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Jl. Dukuh Menanggal XII/4

Surabaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan izin pengambilan data untuk penyusunan tugas akhir/skripsi mahasiswa atas nama Aqila Ramadhana dengan judul skripsi "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Gangsal Berkah Logistik Surabaya"

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Bahwa kami tidak keberatan, dan kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja

Demikian surat balasan dari kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih

Kepala Staff Administrasi  
PT. Gangsal Berkah Logistik



Wheni Retnasari, S.E.

## Lampiran 5 BPE Masa Januari

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : <a href="mailto:pengaduan@pajak.go.id">pengaduan@pajak.go.id</a> ; <a href="mailto:informasi@pajak.go.id">informasi@pajak.go.id</a></p>	
<p>BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)</p>		
<p>NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 43090207137214176509</p>		
<p>NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak</p>	<p>:945844090618000 :GANGSAL BERKAH LOGISTIK :PPH2326 :0 :17-02-2021 :2021 :1</p>	<p>QR Code</p>  <p>RQHRH538</p>
<p>Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda</p>		

# Lampiran 6 SPT Masa Januari

area staples

	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>	<b>FORMULIR 1724 INDUK</b>
Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		area barcode
Masa Pajak (mm-yyyy) H 1	H7 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- H4 <input type="checkbox"/>	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Dua oleh petugas) 0 H.5
01 - 2021		

**A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

A.1 NPWP	: 9 4 5 8 4 4 0 9 0 6 1 8 0 0 0
A.2 NAMA	: GANGSAL BERKAH LOGISTIK
A.3 ALAMAT	: JL. GOLF, GUNUNG SARI, DUKUH PAKIS, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 60224
A.4 NO. TELEPON	: 085735385436 A.5 EMAIL : gangsalberkahlogistik@gmail.com

**B. OBJEK PAJAK**

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh PASAL 23</b>				
1	1. DEKORASI	24-101-01	0,00	0,00
2	2. BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	3. ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	4. HADIAN, PENGHARGAAN, BOKUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	5. SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
6a	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
6b	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
6c	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
6d	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh-PASAL 21		750.546.675,00	15.010.933,00
7	7. JUMLAH PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		750.546.675,00	15.010.933,00
8	8. JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			15.010.933,00
9	9. JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELTULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
<b>II. PPh PASAL 26</b>				
10	10. DEKORASI	27-101-01	0,00	0,00
11	11. BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	12. ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	13. SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	14. IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	15. HADIAN DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	16. PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	17. PREMII SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	18. KEUNTUNGAN KARENA PEMEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	19. PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	20. PREMII ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	21. PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SHMM	27-100-07	0,00	0,00
22	22. PENGHASILAN KEWAJIBAN PAJAK BUKTI SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	23. JUMLAH PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	24. JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	25. JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBELTULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri 2) tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) 3) Sewa yang telah dibebaskan PPh pasal 21 ayat (1) huruf a) 4) tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dibebaskan PPh Pasal 4 ayat (2) 5) Jene jasa ten sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengurangan dari kode objek pajak 04-104-04 sampai dengan 24-104-03 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

C.1 <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	16 lembar
C.2 <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak/Bukti	1 lembar
C.3 <input type="checkbox"/> Bukti Pemindahbukuan	lembar
C.4 <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	lembar
C.5 <input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Bebas	lembar
C.6 <input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Domisili	lembar
C.7 <input type="checkbox"/> Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibebaskan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat	lembar

**BAGIAN D. PERIYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akribanya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bebaskan di atas beserta lampiran lampiranannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PERGURUS, DLL)	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa dokumen ini telah difandatangan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah
D.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
D.3 NAMA GANGSAL BERKAH LOGISTIK	
D.4 NPWP 9 4 5 8 4 4 0 9 0 6 1 8 0 0 0	
D.5 TANGGAL 1 7 0 2 2 0 2 1	
D.6 TEMPAT KOTA SURABAYA	

## Lampiran 7 Kode Billing Pembayaran PPh Pasal 23 Masa Januari



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP	:	94.584.409.0-618.000
NAMA	:	GANGSAL BERKAH LOGISTIK
ALAMAT	:	JL GOLF
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411124
JENIS SETORAN	:	104
MASA PAJAK	:	0101
TAHUN PAJAK	:	2021
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	15.010.933
TERBILANG	:	Lima Belas Juta Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah
URAIAN	:	-
NPWP PENYETOR	:	94.584.409.0-618.000
NAMA PENYETOR	:	GANGSAL BERKAH LOGISTIK

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING	:	0249 7168 2228 075
MASA AKTIF	:	11/03/2021 15:01:37

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



## Lampiran 8 Bukti Pembayaran PPh Pasal 23 Masa Januari

**Bill Payment**

**Transaction Status**

**Bill Payment Information**

Trx Status : Executed Successfully  
 Transaction Reference No. : 202102131329094587  
 From Account : 967995869/GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 To Institution : PENERIMAAN NEGARA PT(IDR)  
 Billing Id : 024971682228075  
 Bill Name :  
 Mata Uang : IDR  
 Nama : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 NTB : 00000075642  
 Akun : 411124  
 Alamat : JL GOLF - KOTA SURABAYA  
 NTPN : 34F604E05T1209RB  
 Nomor SK : 00000000000000  
 Kode Jenis Setoran : 104  
 NPWP : 945844090618000  
 Masa Pajak : 01/01/2021  
 Total Charges : null

**Beneficiary Notification**

Notification Flag : Send  
 Beneficiary Flag : gangsalsberkahlogistik@gmail.com

**Instruction Mode**

Immediate : 13-Feb-2021

**Transaction History**

Action Date	Action Type	Action By	Proxy User	Amount	Successful/Failed	Trx Status
13-Feb-2021 13:37:38	Execute	System	IDR	15,010,933.00	Success	Berhasil Dijalankan
13-Feb-2021 13:37:33	Release	WHENI01 - WHENI	IDR	15,010,933.00	Success	Belum Dijalankan
13-Feb-2021 13:35:31	Approve	WHENI01 - WHENI	IDR	15,010,933.00	Success	Belum Dirilis
13-Feb-2021 13:23:45	Create	WHENI01 - WHENI	IDR	15,010,933.00	Success	Menunggu persetujuan

# Lampiran 9 Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. Trans Milenial Asia

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN  
PPH PASAL 23**

**FORM 1724 - III**

Lembar ke-1 : Lembar Wajib Pajak yang Dipotong  
Lembar ke-2 : Lembar Pemotong Pajak  
Lembar ke-3 : Lembar Keterangan Pajak

H.1 NOMOR : 3300000016

H.2  Pembetulan Ke-\_\_\_\_\_ H.3  Pembatalan

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP : 858759772611000  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : TRANS MILENIAL ASIA  
 A.4 Alamat : GEDUNG BUMI MANDIRI TOWER 1 LV 10 R. S-10 JL BASUKI RAHMAD  
 Kelurahan/Desa : EMBONG KALIASIN Kecamatan : GENTENG  
 Kota/Kabupaten : KOTA SURABAYA Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 60271  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	10.970.375,00	0	2	219.407,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 002/INV/TMA/I/2021 Tanggal: 26/01/2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP : 945844090618000  
 C.2 Nama Wajib Pajak : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.3 Tanggal : 09/02/2021  
 C.4 Nama Penandatangan : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.5  86ENMM29  
 Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pajak QR Code yang tertera disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**H. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh: nomor ini tertera dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 angka satu pertama bermula 31-000000001.

H.2 Diisi dengan tanda bintang (\*) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pemotongan dan terdapat urutan pemotongan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembebasan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**

A.1 Diisi dengan nama, alamat dan jenis pekerjaan.

A.2 Diisi dengan nomor NPWP wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kode NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencukupi maka nama yang dibalik dapat digunakan.

A.3 Diisi dengan alamat tempat tinggal wajib pajak yang dipotong, yakni RT/RW, Kelurahan/Cara, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Kode Pos.

A.4 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**

B.1 Diisi dengan masa pajak, yakni saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.

B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

24-104-02 (Sewa dan pemanfaatan lain bahutangan dengan penggunaan harta pribadi sama tanah dan bangunan yang telah dilayani PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh).

24-104-01 (Sewa tidak termasuk dengan harta pribadi sama tanah dan bangunan yang telah dilayani PPh Pasal 4 Ayat(1) UU PPh).

Bunga bank termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(1).

24-104-01 (Jasa Telesel).

24-104-02 (Jasa Managemen).

24-104-03 (Jasa Kesehatan).

0000 (Bukti Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III).

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: nol dua jesa lebih adalah 2% dan dengan angka 2.

B.6 Diisi dengan nomor PPh Pasal 23 yang terdapat, termasuk PPh yang dipotong pemotongan DTP, tidak hal mendapat fasilitas insentif.

B.7 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pemotongan dan terdapat urutan pemotongan dengan angka.

B.8 Diisi dengan nama, alamat dan jenis pekerjaan wajib pajak yang dipotong, yakni RT/RW, Kelurahan/Cara, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Kode Pos.

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta tercantum dalam dokumen pemotongan DTP dan Nomor Transaksi Pemotongan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Diisi dengan Nama Pemotongan Pajak Pemotongan Wajib Pajak.

C.5 Kode QR tertera sebagai pengaman e-Dokumentasi. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibuktikan dengan terdapat pernyataan Pihak Pemotongan Ditanggung Pemerintah (DTP).

## Lampiran 10 Invoice Tagihan PT. Trans Milenial Asia

NO	KETERANGAN	QTY	JUMLAH HARGA
1	Biaya Trucking : - Tambak Lagoon – Lamongan Shorebase - Perak – Waru - Qoobah – MRTU - Trosobo – Lamongan		9,184,500 408,200 1,020,500 357,175
TERBILANG : SEPULUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH			10,970,375

Kepada Yth :  
PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
u/p. Wheni Retnasari

**INVOICE**  
No. 0002/INV/TMA/I/2021

Pembayaran harap di transfer ke

Bank Mandiri  
No. Rekening 1410021820188  
An. PT. Trans Milenial Asia

Surabaya, 26 Januari 2021

  
**Reza Yanuar**  
PT. TRANS

# Lampiran 11 Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. Mutiara Perkasa

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN                  PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> <small>Lembar ke-1 : Lembar Objek Pajak yang Dipotong                  Lembar ke-2 : Lembar Pemotongan Pajak                  Lembar ke-3 : Lembar Keterangan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000001	
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-_____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP : 026332627605000  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : MUTIARA PERKASA  
 A.4 Alamat : JL. TANJUNG SADARI  
 Kelurahan/Desa : PERAK BARAT Kecamatan : KREMBANGAN  
 Kota/Kabupaten : KOTA SURABAYA Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 60177  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Mesa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	205.837.500,00	0	2	4.116.750,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 023/INV-MP/XII/2020 Tanggal: 15/12/2020

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) / Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP : 945844090618000  
 C.2 Nama Wajib Pajak : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.3 Tanggal : 09/02/2021  
 C.4 Nama Penandatanganan : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.5   
 WVPY0YTD

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pajak QR Code yang tertera disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**H. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit pada Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh: nomor unit tertera dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 adalah nomor pertama berangka 31-000000001.  
 Nama Bukti Pemotongan tidak bertanda tangan dan dibebaskan pembetulan Bukti Pemotongan.  
 H.2 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pemeliharaan dan tulisan urutan pemotongan dengan angka.  
 H.3 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penomoran Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi melainkan diterapkan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Isikan ini sesuai dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Contoh: jika wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.00.000.000.000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) namun bagi wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencukupi maka nama yang dibalik dapat digunakan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebagaimana di kartu pajak yang dipotong, yakni RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.  
 A.6 Diisi dengan nama dan alamat surat kabar terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**

B.1 Diisi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-10-02 (Sewa dan pemanfaatan lain bahutangan dengan penggunaan harta pribadi sama tanah dan bangunan yang telah dilayani PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.  
 24-10-01 (Sewa dan pemanfaatan lain bahutangan dengan penggunaan harta pribadi sama tanah dan bangunan yang telah dilayani PPh Pasal 4 Ayat (1) UU PPh.  
 24-10-01 (Sewa).  
 24-10-01 (Sewa Tanah).  
 24-10-02 (Sewa Managemen).  
 24-10-02 (Sewa Kebutuhan).  
 24-10-02 (Sewa Jasa) sama dengan jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formuler 1724/II.  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atau jasa lebih adalah 2% dan dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan tanda PPh Pasal 23 yang terdapat, termasuk PPh yang dipotong pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan tanggal potong pajak, sesuai dengan tanggal terdapat pada Faktur Pajak, Permintaan, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, dan lain-lain.  
 B.8 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta sertakan nomor dokumen pemotongan DTP dan Nomor Transaksi Pemotongan Negara (NTPN).

**C. Mengetahui Pemotong Pajak**

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi dengan Nama Pemotongan Pajak Pemotongan Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR terdapat sebagai pengaman e-Dokumen. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan tanda tangan dan cap basah wajib Pajak Pemotongan Ditanggung Pemerintah (DTPN).

# Lampiran 12 Invoice Tagihan PT. Mutiara Perkasa

**PT. MUTIARA PERKASA**  
 Jl. Tanjung Sadari No. 137 C  
 Surabaya - Jawa - Timur  
 Ph:031-3576613 Fax:031-3553267

## INVOICE - PELUNASAN

Nomor : 023/INV-MP/XII/2020

Kepada : **PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
 Alamat : Jl. Golf II No.2  
 UP : Surabaya  
 Gudang Asal : Gd. Gresik  
 Tujuan : Aceh - Kab.Nagan Raya

SPK No : 0010/SPK-GBL/X/2020  
 Volume : 499.000 Kg  
 Service : DOOR TO DOOR

NO. SPK	Jenis Barang	Tujuan	Uraian		Tarif /Kg	Tarif IDR
			KOLI	Berat/Kg		
0010/SPK-GBL/X/2020	<b>Pengiriman (Ocean freight):</b>					
		Kecamatan :				
		Beutong Ateuh	100	5.000	IDR 1.375	IDR 6.875.000,00
		Banggalang	1.900	95.000	IDR 1.375	IDR 130.625.000,00
		Beutong	2.580	129.000	IDR 1.375	IDR 177.375.000,00
		Seunagan Timur	1.080	54.000	IDR 1.375	IDR 74.250.000,00
		Seunagan	1.660	83.000	IDR 1.375	IDR 114.125.000,00
		Suka Makmue	1.340	67.000	IDR 1.375	IDR 92.125.000,00
		Kuala	80	4.000	IDR 1.375	IDR 5.500.000,00
		Tadu Raya	320	16.000	IDR 1.375	IDR 22.000.000,00
		Darul Makmur	300	15.000	IDR 1.375	IDR 20.625.000,00
		Kuala Pesisir	320	16.000	IDR 1.375	IDR 22.000.000,00
		Tripa Makmur	300	15.000	IDR 1.375	IDR 20.625.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>9.980</b>	<b>499.000</b>	
<b>TOTAL FP (30%)</b>						<b>IDR 205.837.500,00</b>
<b>PPN</b>						<b>IDR 2.058.375,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>IDR 207.895.875,00</b>

Terbilang : Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

**BANK DANAMON**  
**CAB. SURABAYA**  
**AC: 3528046083**  
**A/N: MUTIARA PERKASA PT**

Surabaya, 15 Desember 2020

Hormat kami,  
  
**TONNY KURNIAWAN**  
 ACC DEPT

Banggalang = 90.000 \*      DPP: 205.837.500  
 Tadu raya = 12.000 \*      PPN: 2058.375  
 Kuala : 17000 \*      PPh: 4.116.750  
 Seunagan Amur = 59.000 ✓  
 Suka makmue = 67.000 ✓  
 Kuala pesisir = 3200 \*

\* Darul Makmur  
 belabahan di Sj 2000



**PT. MUTIARA PERKASA**

Jl. Tanjung Sadari No. 137 C  
Surabaya - Jawa - Timur  
Ph:031-3576613 Fax:031-3553267

**INVOICE - PELUNASAN**

Nomor : 037/INV-MP/XII/2020

Kepada : PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
Alamat : Jl. Golf II No.2  
UP : Surabaya  
Gudang Asal : Gd. Gresik  
Tujuan : Jawa Tengah - Kab. Pekalongan

SPK No : -  
Volume : 315.800 Kg  
Service : DOOR TO DOOR

Keterangan	Jenis Barang	Tujuan	Uraian		Tarif /Kg		Tarif IDR
			KOLI	Berat/Kg			
Pengiriman Jawa Tengah Kab. Pekalongan	PUPUK NPK	Kecamatan: Kandangserang	3.660	183.000	IDR 400	IDR	73.200.000,00
	PUPUK NPK	Kesesi	200	10.000	IDR 400	IDR	4.000.000,00
	PUPUK NPK	Lebakbarang	1.344	67.200	IDR 400	IDR	26.880.000,00
	PUPUK NPK	Paninggaran	1.112	55.600	IDR 400	IDR	22.240.000,00
TOTAL			6.316	315.800		IDR	126.320.000,00
TOTAL FP (30%)						IDR	37.896.000,00

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah

BANK DANAMON  
CAB. SURABAYA  
AC: 3528046083  
A/N: MUTIARA PERKASA PT

Surabaya, 18 Desember 2020

Hormat kami,

  
PT. MUTIARA PERKASA  
TONNY KURNIAWAN  
ACC DEPT





**PT. MUTIARA PERKASA**  
 Jl. Tanjung Sadari No. 137 C  
 Surabaya - Jawa - Timur  
 Ph:031-3576613 Fax:031-3553267

**I N V O I C E - PELUNASAN**

Nomor : 038/INV-MP/XII/2020

Kepada : **PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
 Alamat : Jl. Golf II No.2  
 UP : Surabaya  
 Gudang Asal : Gd. Gresik  
 Tujuan : Jawa Tengah - Kab.Grobogan

SPK No : -  
 Volume : 209.000 Kg  
 Service : DOOR TO DOOR

Keterangan	Jenis Barang	Tujuan	Uraian		Tarif /Kg	Tarif IDR
			KOLI	Berat/Kg		
Pengiriman Jawa Tengah Kab. Grobogan	PUPIK NPK	Kecamatan:	60	3.000	IDR 370	IDR 1.110.000,00
	PUPIK NPK	Kedungati	140	7.000	IDR 370	IDR 2.590.000,00
	PUPIK NPK	Penawangan	184	9.200	IDR 370	IDR 3.404.000,00
	PUPIK NPK	Karangrayung	628	31.400	IDR 370	IDR 11.618.000,00
	PUPIK NPK	Geyer	200	10.000	IDR 370	IDR 3.700.000,00
	PUPIK NPK	Toroh	40	2.000	IDR 370	IDR 740.000,00
	PUPIK NPK	Pulukulon	60	3.000	IDR 370	IDR 1.110.000,00
	PUPIK NPK	Gabus	92	4.600	IDR 370	IDR 1.702.000,00
	PUPIK NPK	Kradenan	76	3.800	IDR 370	IDR 1.406.000,00
	PUPIK NPK	Ngarigan	1.440	72.000	IDR 370	IDR 26.640.000,00
	PUPIK NPK	Wirosari	160	8.000	IDR 370	IDR 2.960.000,00
	PUPIK NPK	Tawangharjo	80	4.000	IDR 370	IDR 1.480.000,00
	PUPIK NPK	Grobogan	60	3.000	IDR 370	IDR 1.110.000,00
	PUPIK NPK	Brati	120	6.000	IDR 370	IDR 2.220.000,00
	PUPIK NPK	Gubug	200	10.000	IDR 370	IDR 3.700.000,00
	PUPIK NPK	Tegowanu	460	23.000	IDR 370	IDR 8.510.000,00
	PUPIK NPK	Tanggungharjo	180	9.000	IDR 370	IDR 3.330.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>4.180</b>	<b>209.000</b>	
<b>TOTAL FP (30%)</b>						<b>IDR 23.199.000,00</b>


Terbilang : Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah

**BANK DANAMON**  
**CAB. SURABAYA**  
 AC: 3528046083  
 A/N: MUTIARA PERKASA PT

Surabaya, 18 Desember 2020  
 Horner Yam,

  
**TONY KURNITAWAN**  
 ACC DEPT

17000  
 = 24000  
 245 000

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN          PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	Lembar 1 : Untuk Web Pajak yang dipotong Lembar 2 : Untuk Pemotong Pajak Lembar 3 : Untuk Kantor Penyetoran Pajak	
H.1 NOMOR : 3300000004		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP : 026332627605000  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : MUTIARA PERKASA  
 A.4 Alamat : JL. TANJUNG SADARI  
 Kelurahan/Desa : PERAK BARAT Kecamatan : KREMBANGAN  
 Kota/Kabupaten : KOTA SURABAYA Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 60177  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	1.935.000,00	0	2	38.700,00

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen Invoice Nomor Dokumen 039/INV-MP/XII/2020 Tanggal: 18/12/2020

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Pambatasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP : 945844090618000  
 C.2 Nama Wajib Pajak : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.3 Tanggal : 09/02/2021  
 C.4 Nama Penandatangan : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.5



DHQ058GN

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

- H. Bagian Header Formulir**
- H.1 Dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.
- Catatan: dibebaskan pembayar dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik berlaku beginning 31-09-2020/2021.
- H.2 Dengan tanggal cetak (1) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan Pambatasan tersebut adalah tahun terbitan undak perubahan dan angka.
- H.3 Dengan lembar cetak (3) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.
- A. Mendaftar Web Pajak yang Dipotong**
- Web pajak dengan format: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Penandaftar Bukti Pemotongan tidak berdasarkan memiliki sebelumnya dibuktikan Pasal 15A UU KUP.
- A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 0000000000000000.
- A.2 Wajib diisi Nomor Urut Kependaftarannya(NUR) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- A.3 Dilarang dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencantumkan nama yang diizinkan dapat diuraikan.
- A.4 Dilarang dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Alamat: RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
- A.5 Dilarang dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**
- B.1 Dilarang memasukkan pajak saat terbitnya PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.
- B.2 Dilarang mengisi kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
- 24-00-01 Harta, penghasilan, bukan dari sumber selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf a UU PPh.
  - 24-00-02 Sisa dan penghasilan lain termasuk penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak dalam masa transisi yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.
  - 24-00-01 Dividen tidak termasuk kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
  - 24-00-01 Royalti.
  - 24-00-01 Jasa Tenan.
  - 24-04-02 Jasa Manajemen.
  - 24-04-01 Jasa Konsultansi.
- Kode Objek Pajak: Jasa Lain, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724/II.
- B.3 Dilarang dengan lembar cetak (1) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- B.4 Dilarang dengan lembar cetak (2) pada kotak, yang diisi dengan nomor urut pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- B.5 Dilarang dengan lembar cetak (3) pada kotak yang tertera, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal pembayar fasilitas tersebut.
- B.6 Dilarang dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain: Faktur Pajak, Kuitansi Penyetoran, Surat Pengisian, Bukti Pembayaran, Akta Notaris, Akta RUPS, Surat Perintah, Tuntutan nomor dan tanggal dompet/rekening.
- B.7 Dilarang dengan lembar (1) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas, Tuntutan Nomor dan Tanggal SKB.
- B.8 Dilarang dengan lembar (3) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta ketentuan dasar forum pemotongan DTP dan Nomor Tuntutan Penilaian Negara (NTPN).
- C. Mendaftar Pemotong Pajak**
- C.1 Dilarang dengan NPWP Pemotong Pajak.
- C.2 Dilarang dengan nama Pemotong Pajak.
- C.3 Dilarang dengan tanggal penandaftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
- C.4 Dilarang dengan Fajal Pajak/wajib Pajak/wajib Pajak/wajib Pajak.
- C.5 Kode QR ini tertera sebagai pengaman elektronis. Untuk verifikasi kode QR dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibuktikan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

**PT. MUTIARA PERKASA**  
 Jl. Tanjung Sadari No. 137 C  
 Surabaya - Jawa - Timur  
 Ph:031-3576613 Fax:031-3553267

**I N V O I C E - P E L U N A S A N**

Nomor : 039/INV-MP/XII/2020

Kepada : **PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
 Alamat : Jl. Golf II No.2  
 UP : Surabaya  
 Gudang Asal : Gd. Gresik  
 Tujuan : Jawa Tengah - Kab.Brebes

SPK No : -  
 Volume : 15.000 Kg  
 Service : DOOR TO DOOR

Keterangan	Jenis Barang	Tujuan	Uraian		Tarif /Kg	Tarif IDR
			KOLI	Berat/Kg		
Pengiriman Jawa Tengah Kab. Brebes	PUPUK NPK	Kecamatan: Bantarkawung	300	15.000	IDR 430	IDR 6.450.000,00
TOTAL			300	15.000		IDR 6.450.000,00
TOTAL FP (30%)						IDR 1.935.000,00

Terbilang : Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

**BANK DANAMON**  
**CAB. SURABAYA**  
**AC: 3528046083**  
**A/N: MUTIARA PERKASA PT**

Surabaya, 18 Desember 2020  
 Horngok kanti  
  
**TONNY KURNIAWAN**  
 ACC DEPT



**PT. MUTIARA PERKASA**  
 Jl. Tanjung Sadari No. 137 C  
 Surabaya - Jawa - Timur  
 Ph:031-3576613 Fax:031-3553267

**INVOICE - PELUNASAN**

Nomor : 040/INV-MP/XII/2020

Kepada : **PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
 Alamat : Jl. Golf II No.2  
 UP : Surabaya  
 Gudang Asal : Gd. Gresik  
 Tujuan : Lampung - Kab.Tanggamus

SPK No : -  
 Volume : 47.000 Kg  
 Service : DOOR TO DOOR

Keterangan	Jenis Barang	Tujuan	Uralan		Tarif /Kg	Tarif IDR
			KOLI	Berat/Kg		
Pengiriman Lampung Kab. Tanggamus	PUPUK NPK	Kecamatan: Pulau Panggung	940	47.000	IDR 850	IDR 39.950.000,00
TOTAL			940	47.000		IDR 39.950.000,00
TOTAL FP (30%)						IDR 11.985.000,00

Terbilang : Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

**BANK DANAMON**  
**CAB. SURABAYA**  
 AC: 3528046083  
 A/N: MUTIARA PERKASA PT

Surabaya, 29 Desember 2020

Hormat kami,  
  
**TONNY KURNIAWAN**  
 ACC DEPT



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN  
PPH PASAL 23

FORM 1724 - III

Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak yang dipotong  
Lembar 2 : Untuk Pemotong Pajak  
Lembar 3 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

H.1 NOMOR : 3300000007

H.2  Pembetulan Ke- \_\_\_\_\_ H.3  Pembatalan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : 026332627605000  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : MUTIARA PERKASA  
 A.4 Alamat : JL. TANJUNG SADARI  
 Kelurahan/Desa : PERAK BARAT Kecamatan : KREMBANGAN  
 Kota/Kabupaten : KOTA SURABAYA Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 60177  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	96.135.000,00	0	2	1.922.700,00

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen Invoice Nomor Dokumen 041/INV-MP/XII/2020 Tanggal: 29/12/2020

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Pambasoran tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP : 945844090618000  
 C.2 Nama Wajib Pajak : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.3 Tanggal : 09/02/2021  
 C.4 Nama Penandatangan : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.5

VP-SKK/INV

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

- H. Bagian Header Formulir
- H.1. Dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.
  - Contoh: dibebaskan bea cukai dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 adalah nomor bea cukai 31-00000001.
  - H.2. Dengan lembar kerja yang tertera pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, adalah nomor yang tertera pada formulir nama yang dibebaskan dengan angka.
  - H.3. Dengan lembar kerja yang tertera pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, adalah nomor yang tertera pada formulir nama yang dibebaskan dengan angka.
- A. Mendaftar Wajib Pajak yang Dipotong
- Wajib dipotong bea cukai, dengan cap basah.
  - Pembelian Bukti Pemotongan tidak berdasarkan pembelian sebelumnya dilakukan Pasal 23A UU KUP.
  - A.1. Kolom ini diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 000.000.000.000.
  - A.2. Wajib diisi Nomor Urut Kependaftarannya (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
  - A.3. Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencantumkan nama yang dibebaskan dapat diuraikan.
  - A.4. Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
  - A.5. Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong
- B.1. Diisi dengan masa pajak saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.
  - B.2. Diisi dengan kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
    - 24-00-01: Hasil, penghasilan, bunga dan royalti selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf a UU PPh.
    - 24-00-02: Sewa dan penghasilan lain lainnya dengan penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.
    - 24-01-01: Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
    - 24-01-02: Bunga mata investasi jangka panjang objek PPh Pasal 4 Ayat(1).
    - 24-03-01: Royalti.
    - 24-04-01: Jasa Tenan.
    - 24-04-02: Jasa Manajemen.
    - 24-04-03: Jasa Konsultan.
  - B.3. Kode Objek Pajak. Jika Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724/II.
  - B.4. Diisi dengan jumlah yang telah dibayar.
  - B.5. Diisi dengan jumlah penghasilan PPh Pasal 23. Contoh: saat masa pajak adalah 20, diisi dengan angka 2.
  - B.6. Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal pembayar fasilitas tersebut.
  - B.7. Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Pengajian, Bukti Pembayaran, Akta Notaris, Akta RUPS, Surat Perintah, Tuntutan nomor dan tanggal dompet NPWP.
  - B.8. Diisi dengan tanggal yang tertera pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.
  - B.9. Diisi dengan tanggal yang tertera pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang dipotong ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Tuntutan Penilaian Negara (NTPN).
- C. Mendaftar Pemotong Pajak
- C.1. Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
  - C.2. Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
  - C.3. Diisi dengan tanggal pembelian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
  - C.4. Diisi Nama Wajib Pajak/Pembeli/ Wakil Pagar/Usaha Wajib Pajak.
  - C.5. Kode QR ini tertera sebagai pengaman. Untuk melakukan verifikasi kode QR dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

**PT. MUTIARA PERKASA**  
 Jl. Tanjung Sadari No. 137 C  
 Surabaya - Jawa - Timur  
 Ph:031-3576613 Fax:031-3553267

**INVOICE - PELUNASAN**

Nomor : 041/INV-MP/XII/2020

Keptada : **PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
 Alamat : Jl. Golf II No.2  
 IP : Surabaya  
 Tujuan Asal : Gd. Gresik  
 Tujuan : Lampung - Kab. Pesisir Barat


SPK No : -  
 Volume : 377.000 Kg  
 Service : DOOR TO DOOR

Keterangan	Jenis Barang	Tujuan	Uraian		Tarif /Kg	Tarif IDR
			KOLI	Berat/Kg		
Pengiriman Lampung Kab. Pesisir Barat	PUPUK NPK	Kecamatan: LEMONG	360	18.000	IDR 850	IDR 15.300.000,00
		BANGKUNAT	1.200	60.000	IDR 850	IDR 51.000.000,00
		PESISIR UTARA	200	10.000	IDR 850	IDR 8.500.000,00
		KARYA PENGGAWA	240	12.000	IDR 850	IDR 10.200.000,00
		NGAMBUR	2.100	105.000	IDR 850	IDR 89.250.000,00
		PESISIR SELATAN	3.440	172.000	IDR 850	IDR 146.200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.540</b>	<b>377.000</b>		<b>IDR 320.450.000,00</b>
<b>TOTAL FP (30%)</b>						<b>IDR 96.135.000,00</b>

Terbilang : Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

**BANK DANAMON**  
**CAB. SURABAYA**  
**AC: 3528046083**  
**A/N: MUTIARA PERKASA PT**

Surabaya, 29 Desember 2020  
 Hormat kami,  
  
**TONNY KURNIAWAN**  
 ACC. DEPT

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	Lembar 1 : Untuk Web Pajak yang dipotong Lembar 2 : Untuk Pemotong Pajak Lembar 3 : Untuk Kantor Penyetoran Pajak	
H.1 NOMOR : <b>3300000006</b>		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP : **026332627605000**

A.2 NIK : \_\_\_\_\_

A.3 Nama : **MUTIARA PERKASA**

A.4 Alamat : **JL. TANJUNG SADARI**

Kelurahan/Desa : **PERAK BARAT** Kecamatan : **KREMBANGAN**

Kota/Kabupaten : **KOTA SURABAYA** Provinsi : **JAWA TIMUR** Kode Pos : **60177**

A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	102.000.000,00	0	2	2.040.000,00

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen : **Invoice** Nomor Dokumen : **042/INV-MP/XII/2020** Tanggal : **29/12/2020**

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) / Pembabasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP : **945844090618000**

C.2 Nama Wajib Pajak : **GANGSAL BERKAH LOGISTIK**

C.3 Tanggal : **09/02/2021**

C.4 Nama Penandatangan : **GANGSAL BERKAH LOGISTIK**

C.5



BHXJ/GSKB

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

**Penunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

- H. Bagian Header Formulir**
- H.1 Ditulis dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit.
- Catatan :** Dibebaskan pembayar dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama kali bernomor 31-000000001.
- H.2 Ditulis dengan nama wajib pajak yang dipotong, sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencantumkan nama wajib pajak, maka wajib diisi dengan nama yang tertera dalam dokumen yang bersangkutan.
- H.3 Ditulis dengan jenis barang (K) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.
- A. Mendaftar Wajib Pajak yang Dipotong**
- Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
- Penandaftar Bukti Pemotongan tidak berdasarkan/mereski sebelumnya dibebaskan Pasal 23A UU KUP.
- A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 000.0000.0000.000.
- A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- A.3 Ditulis dengan nama wajib pajak yang dipotong, sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencantumkan nama wajib pajak, maka wajib diisi dengan nama yang tertera dalam dokumen yang bersangkutan.
- A.4 Ditulis dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong, jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
- A.5 Ditulis dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**
- B.1 Ditulis dengan masa pajak saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy.
- B.2 Ditulis dengan kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
- 24-00-01 Harta, penghasilan, sewa dan royalti selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf a UU PPh.
  - 24-01-02 Jasa dan penghasilan lain termasuk penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.
  - 24-03-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
  - 24-04-02 Bunga bank termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(1).
  - 24-05-01 Royalti.
  - 24-06-01 Jasa Tenes.
  - 24-04-02 Jasa Manajemen.
  - 24-04-02 Jasa Konsultan.
- B.3 Ditulis dengan masa pajak saat terdapat PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-II.
- B.4 Ditulis dengan jenis barang (K) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- B.5 Ditulis dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Catatan: saat ini ada tiga tingkat pajak 2%, 5% dan dengan angka 2.
- B.6 Ditulis dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal pembayar fasilitas tersebut.
- B.7 Ditulis dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Pengajian, Bukti Pembayaran, Akta Notaris, Akta RUPS, Surat Perintah, Tindakan nomor dan tanggal dompet NPWP.
- B.8 Ditulis dengan tanggal (K) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.
- B.9 Ditulis dengan nama wajib pajak (K) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pembebasan DTP dan Nomor Tanda Mutasi Pembebasan Negara (NTPN).
- C. Mendaftar Pemotong Pajak**
- C.1 Ditulis dengan NPWP Pemotong Pajak.
  - C.2 Ditulis dengan nama Pemotong Pajak.
  - C.3 Ditulis dengan tanggal penandaftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyy.
  - C.4 Ditulis nama Wajib Pajak/Pengusaha Wajib Pajak/Usaha Wajib Pajak.
  - C.5 Kode QR dan terdapat logo pengisian elektronik. Untuk verifikasi kode QR dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).



**PT. MUTIARA PERKASA**  
 Jl. Tanjung Sadari No. 137 C  
 Surabaya - Jawa - Timur  
 Ph:031-3576613 Fax:031-3553267

**INVOICE - PELUNASAN**

Nomor : 042/INV-MP/XII/2020

Kepada : **PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
 Alamat : Jl. Golf II No.2  
 UP : Surabaya  
 Gudang Asal : Gd. Gresik  
 Tujuan : **Lampung - Kab. Lampung Timur**

SPK No : --  
 Volume : 400.000 Kg  
 Service : DOOR TO DOOR


Keterangan	Jenis Barang	Tujuan	Uraian		Tarif /Kg	Tarif IDR
			KOLI	Berat/Kg		
Pengiriman Lampung Kab. Lampung Timur	Untuk Lahan Kering : PUPUK NPK PUPUK NPK PUPUK NPK	Kecamatan: Jabung	1.900	95.000	IDR 850	IDR 80.750.000,00
		Gunung Pelindung	1.880	94.000	IDR 850	IDR 79.900.000,00
		Mataram Baru	1.352	67.600	IDR 850	IDR 57.460.000,00
	Untuk Lahan Rawa : PUPUK NPK PUPUK NPK PUPUK NPK	Kecamatan: Batanghari	392	19.600	IDR 850	IDR 16.660.000,00
		Marga Tiga	584	29.200	IDR 850	IDR 24.820.000,00
		Sekampung Udik	1.892	94.600	IDR 850	IDR 80.410.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000</b>	<b>400.000</b>		<b>IDR 340.000.000,00</b>
<b>TOTAL FP (30%)</b>						<b>IDR 102.000.000,00</b>

Terbilang : Seratus Dua Juta Rupiah

**BANK DANAMON**  
 CAB. SURABAYA  
 AC: 3528046083  
 A/N: MUTIARA PERKASA PT

Surabaya, 29 Desember 2020

Normal Form  
 RECEIVED  
 PT. MUTIARA PERKASA  
 2020  
 1000  
 TONNY KURNIAWAN  
 ACC DEPT

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	Lembar 1 : Untuk Wab Pajak yang dipotong Lembar 2 : Untuk Pemotong Pajak Lembar 3 : Untuk Kantor Penyetoran Pajak	
H.1 NOMOR : 3300000009		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

## A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : 026332627605000  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : MUTIARA PERKASA  
 A.4 Alamat : JL. TANJUNG SADARI  
 Kelurahan/Desa : PERAK BARAT Kecamatan : KREMBANGAN  
 Kota/Kabupaten : KOTA SURABAYA Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 60177  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	135.388.800,00	0	2	2.707.776,00

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 001/INV-MP/02/21 Tanggal: 04/01/2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pambatasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

## C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP : 945844090618000  
 C.2 Nama Wajib Pajak : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.3 Tanggal : 09/02/2021  
 C.4 Nama Penandatanganan : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.5 


TFZTR5GL

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera di disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

## Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

- H. Bagian Header Formulir
- H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.  
 Contoh: 31000000000000000000  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.  
 H.2 Diisi dengan tanda pengenal (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan Pambatasan (tidak terdapat urutan pembatalan dan angka).  
 H.3 Diisi dengan tanda pengenal (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.
- A. Mendaftar Wajib Pajak yang Dipotong
- Wajib diisi dengan benar, dengan cara: **masukkan** Bukti Pemotongan yang dibebaskan (SKB) sebelumnya digunakan Pasal 23A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 0000000000000000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang ditulis dapat disingkat.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebagaimana data wajib pajak yang dipotong. Jalon, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong
- B.1 Diisi dengan masa pajak saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.2 Diisi dengan kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-00-01: Harta, penghasilan, bunga dan royalti selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf a UU PPh.  
 24-01-02: Bunga dan penghasilan lain termasuk dengan penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.  
 24-01-01: Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 Ringkas kata termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(1).  
 24-03-01: Royalti.  
 24-04-02: Jasa Managemen.  
 24-04-01: Jasa Tenes.  
 24-04-02: Jasa Managemen.  
 24-04-01: Jasa Tenes.
- B.3 Diisi dengan jumlah pajak saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.4 Diisi dengan jumlah pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III.  
 B.5 Diisi dengan tanda pengenal (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.6 Diisi dengan jumlah penghasilan PPh Pasal 23. Contoh: saat ada tiga tanda adalah 24, dua dengan angka 2.  
 B.7 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.8 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Kuitansi Penyetoran, Surat Pengisian, Bukti Pembayaran, Akta Notulans, Akta RUPS, Surat Perintah, Tindakan nomor dan tanggal dompet NPWP.  
 B.9 Diisi dengan tanda pengenal (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.  
 B.10 Diisi dengan tanda pengenal (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta keterangan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).
- C. Mendaftar Pemotong Pajak
- C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal penyetoran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/Pembayar Pajak/Pengusaha Wajib Pajak/Usaha Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR Code terdapat sebagai pengenal elektronis. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai.  
 Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	Lembar 1 : Untuk Wab Pajak yang dipotong Lembar 2 : Untuk Pemotong Pajak Lembar 3 : Untuk Kantor Penyetoran Pajak	
H.1 NOMOR : 3300000008		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

## A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : 026332627605000  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : MUTIARA PERKASA  
 A.4 Alamat : JL. TANJUNG SADARI  
 Kelurahan/Desa : PERAK BARAT Kecamatan : KREMBANGAN  
 Kota/Kabupaten : KOTA SURABAYA Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 60177  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	93.600.000,00	0	2	1.872.000,00

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 002/INV-MP/02/21 Tanggal: 04/01/2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Pembatasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

## C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP : 945844090618000  
 C.2 Nama Wajib Pajak : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.3 Tanggal : 09/02/2021  
 C.4 Nama Penandatangan : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.5 

UMSSJIF1

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera di disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

## Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

- H. Bagian Header Formulir
- H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.  
 Contoh: dibebaskan pembayar dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak seratus lima puluh tiga 31-000000001  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.  
 H.2 Diisi dengan tanda angka (0) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatasan (tidak ada pemotongan dan pengembalian).  
 H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.
- A. Mendaftar Wajib Pajak yang Dipotong
- Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Pembatalan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan pembatalan sebelumnya dilakukan Pasal 15A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 000.0000.000.000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang ditulis dapat disingkat.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong (Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos).  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong
- B.1 Diisi dengan masa pajak saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.2 Diisi dengan kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-00-01 Perolehan, penghasilan, bonus dan royalti selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf a UU PPh.  
 24-01-02 Sisa dan penghasilan lain termasuk dengan penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.  
 24-01-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 Ringkas kata termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(1).  
 24-03-01 Royalti.  
 24-04-01 Jasa Tenes.  
 24-04-02 Jasa Manajemen.  
 24-04-01 Jasa Konsultan.  
 Kode Objek Pajak. Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724/II.  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan kotor.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif 2% atau tanda silang (X) diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal pembayar fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengembalian, Surat Pengajian, Bukti Pembayaran, Akta Notulans, Akta RUPS, Surat Pembatalan, Tindakan nomor dan tanggal dokumen lainnya.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas, Tindakan Nomor dan Tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta sertakan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Tindakan Penilaian Negara (NTPN).
- C. Mendaftar Pemotong Pajak
- C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/Penghasil Wajib Pajak/Usaha Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR Code tertera sebagai pengaman e-kode. Untuk verifikasi kode QR dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

**PT. MUTIARA PERKASA**

Jl. Tanjung Sadari No. 137 C  
Surabaya - Jawa - Timur  
Ph:031-3576613 Fax:031-3553267

**INVOICE - PELUNASAN**

Nomor : 002/INV-MP/I/2021

ada : PT. GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
mat : Jl. Golf II No.2  
Surabaya  
ang Asal : Gd. Gresik  
aan : Kalimantan Selatan - Kab. Hulu Sungai Tengah

SPK No : 0010/SPK-GBL/X/2020

Volume : 520.000 Kg

Service : DOOR TO DOOR

NO. SPK	Jenis Barang	Tujuan	Uraian		Tarif /Kg		Tarif IDR
			KOLI	Berat/Kg			
110/SPK-GBL/X/2020	Pengiriman (Ocean freight): PUJUK NPK	Kecamatan :					
		Haruyan	2.000	100.000	IDR	600	IDR 60.000.000,00
		Batang Alai Timur	2.400	120.000	IDR	600	IDR 72.000.000,00
		Hantakan	6.000	300.000	IDR	600	IDR 180.000.000,00
TOTAL			10.400	520.000		IDR 312.000.000,00	
TOTAL FP (30%)						IDR 93.600.000,00	
PPN						IDR 936.000,00	
TOTAL						IDR 94.536.000,00	

Perbilang : Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

BANK DANAMON  
CAB. SURABAYA  
AC: 3528046083  
A/N: MUTIARA PERKASA PT


Surabaya, 4 Januari 2021

Hormat kami,

PT. MUTIARA PERKASA  
Jl. Tanjung Sadari No. 137 C  
Surabaya - Jawa Timur  
Ph: 031-3576613 Fax: 031-3553267  
5000  
PT. MUTIARA PERKASA  
**TONNY KURNIAWAN**  
ACC DEPT

# Lampiran 13 Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. Lautan Dalam

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN                  PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> <small>Lembar ke-1 : Lembar Wajib Pajak yang Dipotong                  Lembar ke-2 : Lembar Pemotong Pajak                  Lembar ke-3 : Lembar Keterangan Pajak</small>
H.1 NOMOR : 3300000011		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-_____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 312328503615000
A.2 NIK	: _____
A.3 Nama	: LAUTAN DALAM
A.4 Alamat	: JL PANJANGJIWO
Kelurahan/Desa	: PANJANG JIWO Kecamatan : TENGGILIS MEJOYO
Kota/Kabupaten	: KOTA SURABAYA Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 60299
A.5 No. Telepon	: _____

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**


Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	9.000.000,00	0	2	180.000,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 227/LTD/XII/2020 Tanggal: 30/12/2020

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPH : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 945844090618000
C.2 Nama Wajib Pajak	: GANGSAL BERKAH LOGISTIK
C.3 Tanggal	: 09/02/2021
C.4 Nama Penandatanganan	: GANGSAL BERKAH LOGISTIK
C.5	 REF4Z2AA

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pajak QR Code yang tertera disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

- H. Bagian Header Formulir**
- H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit pada Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh: nomor unit tertera dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 adalah nomor pertama bernomor 31-000000001.
  - H.2 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pemotongan dan tarikan urutan pemotongan dengan angka.
  - H.3 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.
- A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**
- A.1 Diisi dengan benar, sesuai data asli.
  - A.2 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan buku NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencukupi maka nama yang dibalik dapat digunakan.
  - A.3 Diisi dengan alamat lengkap sebagaimana tertera pada buku yang dipotong, yakni RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Kode Pos.
  - A.4 Diisi dengan nomor telepon yang sesuai yang dipotong.
  - A.5 Diisi dengan nomor rekening bank saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**
- B.1 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
    - 24-104-02 (Sewa dan pemanfaatan lain bahutangan dengan penggunaan harta pribadi sama tanah dan bangunan yang telah dilayani PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh).
    - 24-104-01 (Sewa tanah termasuk dengan haknya PPh Pasal 23 yang tidak dipotong).
    - Bunga bank termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(1).
    - 24-104-01 (Sewa Tanah).
    - 24-104-02 (Sewa Manufaktur).
    - 24-104-02 (Sewa Kebutuhan).
  - B.2 Diisi dengan benar, sesuai data asli.
  - B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
  - B.4 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
  - B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atau jasa lebih adalah 2% dan dengan angka 2.
  - B.6 Diisi dengan tanda PPh Pasal 23 yang terdapat, termasuk PPh yang dipotong pemotongan DTP, tidak terdapat fasilitas tersebut.
  - B.7 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan atau Pembatalan, Nomor dan Tanggal SKB.
  - B.8 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.
  - B.9 Diisi dengan tanda atau QR Code kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta sertakan nomor dokumen pemotongan DTP dan Nomor Tanda/Marka Pemotongan Negara (NTPH).
- C. Identitas Pemotong Pajak**
- C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
  - C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
  - C.3 Diisi dengan tanggal penutupan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
  - C.4 Diisi dengan Nama Pemotongan Pajak Pemotongan Wajib Pajak.
  - C.5 Kode QR terdapat sebagai pengaman e-Dokumen. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibuktikan dengan terdapat watermark 'Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)'.

Lampiran 14 Invoice Tagihan PT. Lautan Dalam

**KWITANSI - RECEIPT**

No : 227 / LTD / XII / 2020

Terima dari : **PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
 Received from

Sejumlah uang : Sembilan Juta Rupiah  
 For the amount to

Untuk pembayaran :  
 In settlement : sesuai terlampir pada surat jalan

**PT. LAUTAN DALAM**

**JUMLAH AMOUNT** Rp **9,000,000**


Surabaya, 30-Dec-20

p.t. Lautan Dalam

SURABAYA

Marwin Candra Gunawan

---



**PT. LAUTAN DALAM**  
 Jl. Raya Panjang Jiwo No 58  
 Surabaya

Tanggal : 30-Dec-20  
 No Invoice : 227 / LTD / XII / 2020

**INVOICE**

Customer : PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 Alamat : Sentraland Driyorejo Gresik Blok B1 No 14  
 CP : 08535345188  
 UP : Bu Reza

No.	Description	Qty	UOM	Price	Subtotal
1	Muat Material dari Teluk Lamong bongkar Ujung Pangkah	1	Rt	3,000,000	3,000,000
	Tgl. 29 Desember 2020, Nopol L-8927-UG, Driver Yudi, SJ No 1	1	Rt	3,000,000	3,000,000
	Tgl. 29 Desember 2020, Nopol L-8349-UG, Driver Rudyanto, SJ No 2	1	Rt	3,000,000	3,000,000
	Tgl. 29 Desember 2020, Nopol L-8926-UG, Driver Agus, SJ No 3	1	Rt	3,000,000	3,000,000
Total					9,000,000
PPN 10%					
Grand Total					9,000,000

Terbilang : Sembilan Juta Rupiah


Note : Mohon konfirmasi jika ada pembayaran

Rekening Bank :  
 BCA Cabang Rungkut Megah Raya, Surabaya  
 a/n PT.Lautan Dalam  
 673-031-7776

PT. LAUTAN DALAM

SURABAYA

Marwin Candra Gunawan  
 Director

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	Lembar 1 : Untuk Web Pajak yang dipotong Lembar 2 : Untuk Pemotong Pajak Lembar 3 : Untuk Kantor Penyetoran Pajak	
H.1 NOMOR : <b>3300000010</b>		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP : **312328503615000**  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : **LAUTAN DALAM**  
 A.4 Alamat : **JL PANJANGJIWO**  
 Kelurahan/Desa : **PANJANG JIWO** Kecamatan : **TENGGILIS MEJOYO**  
 Kota/Kabupaten : **KOTA SURABAYA** Provinsi : **JAWA TIMUR** Kode Pos : **60299**  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	5.400.000,00	0	2	108.000,00

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen : Invoice  
 Nomor Dokumen : 224/LTD/XIU/2020 Tanggal : 27/12/2020

B.8  PPH Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) / Pambasaban tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPH Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPH DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP : **945844090618000**  
 C.2 Nama Wajib Pajak : **GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
 C.3 Tanggal : **09/02/2021**  
 C.4 Nama Penandatangan : **GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
 C.5 

DBTVZV17

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPH Pasal 23**

- H. Bagian Header Formulir**
- H.1 Dengan nomor Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.  
 Contoh : dibebaskan bebas dari pemotongan PPH Pasal 23 dengan nomor bukti pemotongan 31-00000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.  
 H.2 Dengan jenis masa pajak (1) pada kotak, bila merupakan Bukti Pemotongan Pambasaban/ Surat Keterangan Bebas/ Surat Keterangan Bebas(SKB).  
 H.3 Dengan jenis masa pajak (2) pada kotak, bila merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.
- A. Mendaftar Wajib Pajak yang Dipotong**
- Wajib dipotong terinci, dengan dua jenis.  
 Pembetulan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan/tersebut sebelumnya dibatalkan Pasal 23A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini diisi oleh dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 0000000000000000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencantumkan nama yang diiklankan dapat diuraikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**
- B.1 Diisi dengan masa pajak saat terdapat PPH Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.2 Diisi dengan kode objek PPH Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-00-01 Hasil, penghasilan, sewa dan royalti selain yang telah dipotong PPH Pasal 21 Ayat(1) huruf a UU PPH.  
 24-01-02 Sewa dan penghasilan lain termasuk objek pajak selain yang telah dipotong PPH Pasal 4 Ayat(2) UU PPH.  
 24-01-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 Ringkas kata termasuk bunga yang menjadi objek PPH Pasal 4 Ayat(1).  
 24-03-01 Royalti.  
 24-04-01 Jasa Tenes.  
 24-04-02 Jasa Manajemen.  
 24-04-03 Jasa Konsultansi.  
 24-04-04 Jasa Lain.  
 Kode Objek Pajak. Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPH Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III.
- B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan jenis masa pajak (1) pada kotak, bila yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPH Pasal 23. Contoh: saat masa pajak adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPH Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal pembasaban/tersebut.  
 B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Pengajian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Perintah, Tindakan nomor dan tanggal dompet NPWP.  
 B.8 Diisi dengan tanggal (1) pada kotak, dalam hal PPH Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan jenis masa pajak (1) pada kotak, dalam hal PPH Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta sertakan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Tanda Mutasi Penilaian Negara (NTPN).
- C. Mendaftar Pemotong Pajak**
- C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pemberian Bukti Pemotongan PPH Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/Penghasil Wajib Pajak/Usaha Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR Code tertera sebagai pengaman e-kuitansi. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).



NOT : 224/ LTD / XII / 2020

# KWITANSI - RECEIPT

PT. LAUTAN DALAM

Terima dari / Received from : **PT GANSAL BERKAH TRANSPORT**

Sejumlah uang / For the amount to : *Enam Juta Rupiah*

Untuk pembayaran / In settlement : *sesuai terlampir pada surat jalan*

**JUMLAH AMOUNT Rp 6,000,000**

Surabaya, 27-Dec-20



**PT. LAUTAN DALAM**  
Jl. Raya Panjang Jiwo No 58  
Surabaya

Tanggal : **27-Dec-20**  
No Invoice : **224/ LTD / XII / 2020**

## INVOICE

Customer : **PT GANSAL BERKAH TRANSPORT**  
Alamat : **Perum Semen Indonesia Jl Golf II No 2 - 6 Dukuh Pakis Surabaya**  
CP :  
UP : **Bu Reza**

No.	Description	Qty	UOM	Price	Subtotal
1	Muat Material dari Teluk Lamong bongkar Perak	1	Rit	1,000,000	1,000,000
	Tgl. 17 Desember 2020, Nopol L-9051-UG, Driver Supri, SJ No 1	1	Rit	1,000,000	1,000,000
	Tgl. 17 Desember 2020, Nopol L-9051-UG, Driver Supri, SJ No 2	1	Rit	1,000,000	1,000,000
	Tgl. 18 Desember 2020, Nopol L-9051-UG, Driver Supri, SJ No 3	1	Rit	1,000,000	1,000,000
2	Muat Material dari Teluk Lamong bongkar Perak	1	Rit	1,200,000	1,200,000
	Tgl. 20 Desember 2020, Nopol L-8349-UG, Driver Rusdi, SJ No 01	1	Rit	1,200,000	1,200,000
	Tgl. 20 Desember 2020, Nopol L-8944-IA, Driver Irvan, SJ No 02	1	Rit	1,200,000	1,200,000
				Total	5,400,000
				PPN 10%	
				Grand Total	5,940,000


*Revisi*

Terbilang : *Enam Juta Rupiah*  
Note : **Mohon konfirmasi jika ada pembayaran**

Rekening Bank :  
**BCA Cabang Rungkut Megah Raya, Surabaya**  
a/n PT.Lautan Dalam  
**673-031-7776**

**PT. LAUTAN DALAM**

**PT. LAUTAN DALAM**  
**Marwin Candra Gunawan**  
Director

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN          PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	Lembar 1 : Untuk Web Pajak yang dipotong Lembar 2 : Untuk Pemotong Pajak Lembar 3 : Untuk Kantor Penyetoran Pajak	
H.1 NOMOR : <b>3300000012</b>		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 312328503615000
A.2 NIK	: _____
A.3 Nama	: LAUTAN DALAM
A.4 Alamat	: JL PANJANGJIWO
Kelurahan/Desa	: PANJANG JIWO Kecamatan : TENGGILIS MEJOYO
Kota/Kabupaten	: KOTA SURABAYA Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 60299
A.5 No. Telepon	: _____

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	6.000.000,00	0	2	120.000,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice Nomor Dokumen 212/LTD/XII/2020 Tanggal: 09/12/2020

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Pambasoran tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Nomor: \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan: \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 945844090618000
C.2 Nama Wajib Pajak	: GANGSAL BERKAH LOGISTIK
C.3 Tanggal	: 09/02/2021
C.4 Nama Penandatangan	: GANGSAL BERKAH LOGISTIK
C.5	

B81585GU

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

- H. Bagian Header Formulir**
- H.1 Dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.
- Contoh: dibebaskan berbasis dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik serendah-benar-masa 31-000000001.
- H.2 Dengan tanggal cetak atau (X) pada kotak, bila merupakan Bukti Pemotongan Pambasoran (tanpa uraian pembetulan dan angka).
- H.3 Dengan tanggal cetak atau (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan.
- A. Mendaftar Wajib Pajak yang Dipotong**
- Wajib dipotong berarti: dengan atau tidak.
- Penandaan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan memiliki sebelumnya dibebaskan Pasal 23A UU KUP.
- A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 000000000000000.
- A.2 Wajib diisi Nomor Urut Keperluan/Identifikasi (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencantumkan nama nama yang dibebaskan, dapat diuraikan.
- A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
- A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**
- B.1 Diisi dengan masa pajak saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy.
- B.2 Diisi dengan kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
- 24-00-01: Harta, penghasilan, bunga dan royalti selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf a UU PPh.
- 24-01-02: Bunga dan penghasilan lain termasuk dengan penghasilan yang tidak dibebaskan PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.
- 24-01-01: Dividen tidak termasuk kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
- 24-01-02: Royalti.
- 24-01-01: Jasa Tenes.
- 24-04-02: Jasa Manajemen.
- 24-01-01: Jasa Tenes.
- 24-04-02: Jasa Manajemen.
- 24-01-02: Jasa Manajemen.
- Kode Objek Pajak.** Jika Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-II.
- B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan kotor.
- B.4 Diisi dengan nilai aliran (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif tetap tanpa pilihan adalah 2% dan dengan angka 2.
- B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal pembayar fasilitas tersebut.
- B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Kuitansi Pengiriman, Surat Pengisian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Perintah, Tuntutan nomor dan tanggal dompet listrik.
- B.8 Diisi dengan tanggal (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.
- B.9 Diisi dengan tanggal (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Tuntutan Penilaian Negara (NTPN).
- C. Mendaftar Pemotong Pajak**
- C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
- C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
- C.3 Diisi dengan tanggal pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyy.
- C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/Penghasil Wajib Pajak/Usaha Wajib Pajak.
- C.5 Kode QR ini tertera sebagai pengaman elektronis. Untuk verifikasi kode QR dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

# KWITANSI - RECEIPT

: 037/ LTD / II / 2020

Terima dari / Received from : **PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK**

Sejumlah uang / For the amount to : *Enam Juta Rupiah*

Untuk pembayaran / In settlement : *sesuai terlampir pada surat jalan*

**JUMLAH AMOUNT Rp 6,000,000**

Surabaya, 15-Feb-21



Marwin Candra Gunawan



**PT. LAUTAN DALAM**  
Jl. Raya Panjang Jiwo No 58  
Surabaya

Tanggal : **15-Feb-21**  
No Invoice : **037/ LTD / II / 2020**

## INVOICE

Customer : **PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
Alamat : Sentraland Driyorejo Gresik Blok B1 No 14  
CP : 085335345188  
UP : Bu Reza

No.	Description	Qty	UOM	Price	Subtotal
1	Muat Material dari Teluk Lamong bongkar Ujung Pangkah Tgl. 09 Februari 2021, Nopol L-8927-UG, Driver Yudi No SJ : 02	1	RIT	3,000,000	3,000,000
	Tgl. 09 Februari 2021, Nopol L-8062-UA, Driver Heri No SJ : 01	1	RIT	3,000,000	3,000,000
Total					6,000,000
PPN 10%					
Grand Total					6,000,000

*400.000. (Pag.)*

Total  
PPN 10%  
Grand Total

*6.000.000  
120.000  
5.980.000*

Terbilang : *Enam Juta Rupiah*

Note : Mohon konfirmasi jika ada pembayaran

Rekening Bank :  
BCA Cabang Rungkut Megah Raya, Surabaya  
a/n PT.Lautan Dalam  
673-031-7776

**PT-LAUTAN DALAM**  
*p.t Lautan Dalam*  
**SURABAYA**  
Marwin Candra Gunawan  
Director

*5.190*

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN          PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>			
	Lembar 1 : Untuk Web Pajak yang dipotong Lembar 2 : Untuk Pemotong Pajak Lembar 3 : Untuk Kantor Penyetoran Pajak				
H.1 NOMOR : <b>3300000013</b>					
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan					
<b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG</b>					
A.1 NPWP	:	<b>312328503615000</b>			
A.2 NIK	:				
A.3 Nama	:	<b>LAUTAN DALAM</b>			
A.4 Alamat	:	<b>JL PANJANGJIWO</b>			
Kelurahan/Desa	:	<b>PANJANG JIWO</b> Kecamatan : <b>TENGGILIS MEJOYO</b>			
Kota/Kabupaten	:	<b>KOTA SURABAYA</b> Provinsi : <b>JAWA TIMUR</b> Kode Pos : <b>60299</b>			
A.5 No. Telepon	:				
<b>B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>					
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	2.800.000,00	0	2	56.000,00
B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen <u>Invoice</u> Tanggal : <u>16/01/2021</u> Nomor Dokumen <u>004/LTD/H/2020</u>					
B.8 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) / Pembabasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____					
B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____ SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____					
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK</b>					
C.1 NPWP	:	<b>945844090618000</b>			
C.2 Nama Wajib Pajak	:	<b>GANGSAL BERKAH LOGISTIK</b>			
C.3 Tanggal	:	<b>09/02/2021</b>			
C.4 Nama Penandatangan	:	<b>GANGSAL BERKAH LOGISTIK</b>			
C.5	 07EEEDBJ				
Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera di disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.					
<b>Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23</b>					
<b>H. Bagian Header Formulir</b>					
H.1. Dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: dibebaskan bebas dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah nomor rekening 31-00000001. Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan. H.2. Dengan jenis kode objek pajak, jika merupakan Bukti Pemotongan Pembabasan/ Pembabasan tidak terdapat urutan pembatalan dan angka. H.3. Dengan jenis masa pajak (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembabasan.					
<b>A. Mendaftar Web Pajak yang Dipotong</b>					
Wajib dan dengan benar, dengan cara ini: Penandaftar Bukti Pemotongan tidak berdasarkan/ memiliki sebelumnya dibebaskan Pasal 23A UU KUP. A.1. Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 000000000000000. A.2. Wajib diisi Nomor Urut Kependaftarannya (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. A.3. Dilarang dengan nama wajib pajak yang dipotong, sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencantumkan nama nama yang diklik/ dapat dibebaskan. A.4. Dilarang dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos. A.5. Dilarang dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.					
<b>B. Pajak Penghasilan yang Dipotong</b>					
B.1. Dilarang memasukkan pajak saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy. B.2. Dilarang mengisi kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut: 24-00-01. Hotel, penginapan, rumah dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf a UU PPh. 24-01-02. Sisa dan pendapatan lain-lainnya dengan anggapan bahwa wajib pajak adalah siswa/ mahasiswa dan bagian yang telah dibayar PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh. 24-01-01. Dividen tidak termasuk kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Ringkas kata tersebut hanya yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(1). 24-01-01. Royalti. 24-01-01. Jasa Tenes. 24-04-02. Jasa Manajemen. 24-04-02. Jasa Konsultansi.					
Kode Objek Pajak. Jika Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III. B.3. Dilarang dengan jumlah penghasilan kotor. B.4. Dilarang dengan nilai pajak (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. B.5. Dilarang dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif tetap saja tetapi adalah 2%, dan dengan angka 2. B.6. Dilarang dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal pembabasan fasilitas tersebut. B.7. Dilarang dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Pengajian, Bukti Pembayaran, Akta Pendirian, Akta RUPS, Surat Perintah, Tuntutan nomor dan tanggal dompet NPWP. B.8. Dilarang dengan tanggal (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB. B.9. Dilarang dengan jenis barang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong ditanggung pemerintah (DTP) serta sertakan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Tuntutan Penilaian Negara (NTPN).					
<b>C. Mendaftar Pemotong Pajak</b>					
C.1. Dilarang dengan NPWP Pemotong Pajak. C.2. Dilarang dengan nama Pemotong Pajak. C.3. Dilarang dengan tanggal pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy. C.4. Dilarang dengan tanggal pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy. C.5. Dilarang dengan tanggal pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy. C.6. Kode QR dan tertera sebagai pengisian kode QR. Untuk verifikasi kode QR dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).					

# KWITANSI - RECEIPT

: 004/ LTD / I / 2020

PT. LAUTAN DALAM

Terima dari / Received from : **PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK**

Sejumlah uang / For the amount to : *Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*

Untuk pembayaran / In settlement : sesuai terlampir pada surat jalan

**JUMLAH AMOUNT Rp 2,800,000**

Surabaya, 16-Jan-21

*p.t Lautan Dalam*  
**SURABAYA**  
Marwin Candra Gunawan



**PT. LAUTAN DALAM**  
Jl. Raya Panjang Jiwo No 58  
Surabaya

Tanggal : 16-Jan-21  
No Invoice : 004/ LTD / I / 2020

## INVOICE

Customer : PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
Alamat : Sentraland Driyorejo Gresik Blok B1 No 14  
CP : 085335345188  
UP : Bu Reza

No.	Description	Qty	UOM	Price	Subtotal
1	Muat Material dari Tambak Langan bongkar Shorebase Tgl. 12 Januari 2021, Nopol L-8927-UG, Driver Yudi No SJ : 01	1	RIT	2,800,000	2,800,000
Total					2,800,000
PPN 10%					
Grand Total					2,800,000

Terbilang : *Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*

Note : Mohon konfirmasi jika ada pembayaran

Rekening Bank :  
BCA Cabang Rungkut Megah Raya, Surabaya  
a/n PT. Lautan Dalam  
673-031-7776

**PT. LAUTAN DALAM**  
*p.t Lautan Dalam*  
**SURABAYA**  
Marwin Candra Gunawan  
Director



## KWITANSI - RECEIPT

No : 009/ LTD / I / 2020

PT. LAUTAN DALAM

Terima dari / Received from : **PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK**

Sejumlah uang / For the amount to : Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran / In settlement : sesuai terlampir pada surat jalan

**J U M L A H**  
**A M O U N T**      **Rp**      **2,800,000**

Surabaya, 19-Jan-21

p.t Lautan Dalam  
**SURABAYA**  
Marwin

Sudah

Marwin Candra Gunawan



**PT. LAUTAN DALAM**  
Jl. Raya Panjang Jiwo No 58  
Surabaya

Tanggal : 19-Jan-21  
No Invoice : 009/ LTD / I / 2020

### INVOICE

Customer : PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
Alamat : Sentraland Driyorejo Gresik Blok B1 No 14  
CP : 085335345188  
UP : Bu Reza

No.	Description	Qty	UOM	Price	Subtotal
1	Muat Material dari Tambak Lagon bongkar Shorebase Tgl. 07 Januari 2021, Nopol L-8044-UA, Driver Ivan No SJ : 01	1	RIT	2,800,000	2,800,000
Total					2,800,000
PPN 10%					280,000
Grand Total					3,080,000


Terbilang : Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Note : Mohon konfirmasi jika ada pembayaran

Rekening Bank :  
BCA Cabang Rungkut Megah Raya, Surabaya  
a/n PT.Lautan Dalam  
673-031-7776

PT-LAUTAN-DALAM  
p.t Lautan Dalam  
**SURABAYA**  
Marwin Candra Gunawan  
Director



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN          PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	Lembar 1 : Untuk Web Pajak yang Dipotong Lembar 2 : Untuk Pemotong Pajak Lembar 3 : Untuk Kantor Penyetoran Pajak	
H.1 NOMOR : 3300000015		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

## A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : 312328503615000  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : LAUTAN DALAM  
 A.4 Alamat : JL PANJANGJIWO  
 Kelurahan/Desa : PANJANG JIWO Kecamatan : TENGGILIS MEJOYO  
 Kota/Kabupaten : KOTA SURABAYA Provinsi : JAWA TIMUR Kode Pos : 60299  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-56	5.600.000,00	0	2	112.000,00

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 020/LTD/1/2020 Tanggal: 21/01/2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) /Pembabasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB) Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

## C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP : 945844090618000  
 C.2 Nama Wajib Pajak : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.3 Tanggal : 09/02/2021  
 C.4 Nama Penandatanganan : GANGSAL BERKAH LOGISTIK  
 C.5



PDCCTAAY

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera di disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

## Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

- H. Bagian Header Formulir**
- H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.
- Catatan:** dibebaskan pembayar dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pembayar yang memiliki nomor rekening 31-000000001.
- H.2 Diisi dengan jenis objek (1) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan Pembabasan (tidak terdapat uraian pembabasan dan angka).
- H.3 Diisi dengan jenis barang (3) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembabasan.
- A. Menerima Wajib Pajak yang Dipotong**
- Wajib pajak dengan bentuk, tanggal dan jenis.
- Pemotongan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan pembayar sebelumnya dibuktikan Pasal 23A UU KUP.
- A.1 Kolom ini diisi oleh dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 0000000000000000.
- A.2 Wajib pajak Nomor Bruto Kependaftarannya (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tertera tidak mencantumkan nama nama yang diizinkan dapat dibebaskan.
- A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
- A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**
- B.1 Diisi dengan masa pajak saat terdapat PPh Pasal 23, dengan format perbulan mm-yyyy.
- B.2 Diisi dengan kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
- 24-00-01 Harta, penghasilan, bentuk dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf a UU PPh.
  - 24-00-02 Sisa dan penghasilan lain termasuk objek pajak lainnya yang telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.
  - 24-00-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
  - 24-00-02 Bunga hasil simpanan bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(1).
  - 24-00-01 Royalti.
  - 24-00-02 Jasa Tenes.
  - 24-00-02 Jasa Manajemen.
  - 24-00-02 Jasa Konsultansi.
- Kode Objek Pajak:** Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III.
- B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- B.4 Diisi dengan jenis barang (1) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- B.5 Diisi dengan jenis barang (3) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal pembayar fasilitas tersebut.
- B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Kuitansi Pengiriman, Surat Pengisian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Perintah, Tindakan nomor dan tanggal dokumen lainnya.
- B.8 Diisi dengan nomor barang (1) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.
- B.9 Diisi dengan jenis barang (1) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemotongan DTP dan Nomor Tanda Mutasi Pemisahan Negara (NTPN).
- C. Menerima Pemotong Pajak**
- C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
- C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
- C.3 Diisi dengan tanggal pemotongan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format perbulan mm-yyyy.
- C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/Penghasil Wajib Pajak/Usaha Wajib Pajak.
- C.5 Kode QR dan tertera sebagai pengaman elektronis. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur memindai. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibuktikan pembayar berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).



# KWITANSI - RECEIPT

: 020/ LTD / I / 2020

Terima dari / Received from : **PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK**

Sejumlah uang / For the amount to : Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran / In settlement : sesuai terlampir pada surat jalan

**PT. LAUTAN DALAM**

**JUMLAH AMOUNT Rp 5,600,000**

Surabaya, 21-Jan-21



*Sudoh*

**Marwin Candra Gunawan**



**PT. LAUTAN DALAM**  
Jl. Raya Panjang Jiwo No 58  
Surabaya

Tanggal : **21-Jan-21**  
No Invoice : **020/ LTD / I / 2020**

## INVOICE

Customer : **PT GANGSAL BERKAH LOGISTIK**  
Alamat : **Sentraland Driyorejo Gresik Blok B1 No 14**  
CP : **085335345188**  
UP : **Bu Reza**

No.	Description	Qty	UOM	Price	Subtotal
1	Muat Material dari Tambak Langon bongkar Shorbase Lamongan Tgl. 16 Januari 2021, Noppl W 8879 UI No SJ : 02	1	RIT	2,800,000	2,800,000
	Tgl. 16 Januari 2021, Noppl L 9046 UV No SJ : 01	1	RIT	2,800,000	2,800,000
Total					5,600,000
PPN 10%					
Grand Total					5,600,000

Terbilang : Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Note : Mohon konfirmasi jika ada pembayaran

Rekening Bank :  
BCA Cabang Rungkut Megah Raya, Surabaya  
a/n PT.Lautan Dalam  
673-031-7776

**PT. LAUTAN DALAM**

*p.t. Lautan Dalam*  
**SURABAYA**  
**Marwin Candra Gunawan**  
Director

